

Tim Peneliti Fakultas Hukum Unimal Kaji Efektifitas Penerapan ISPO Pada Industri Kelapa Sawit Utara



Tim Peneliti Fakultas Hukum Unimal Kaji Efektifitas Penerapan ISPO Pada Industri Kelapa Sawit di Aceh Utara

UNIMALNEWS | Lhokseumawe –Tim peneliti dari Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh menyampaikan materi penerapan kebijakan *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)* pada perusahaan Kelapa Sawit dan pengaruhnya terhadap industri biodiesel di Aceh Utara yang berlangsung di Grand Sydney Hotel, Lhokseumawe, Selasa (11/10/2022).

Tim peneliti dari Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh terdiri dari Prof Dr Jamaluddin, Dr Faisal, Dr Elidar MHum, turut serta mahasiswa.

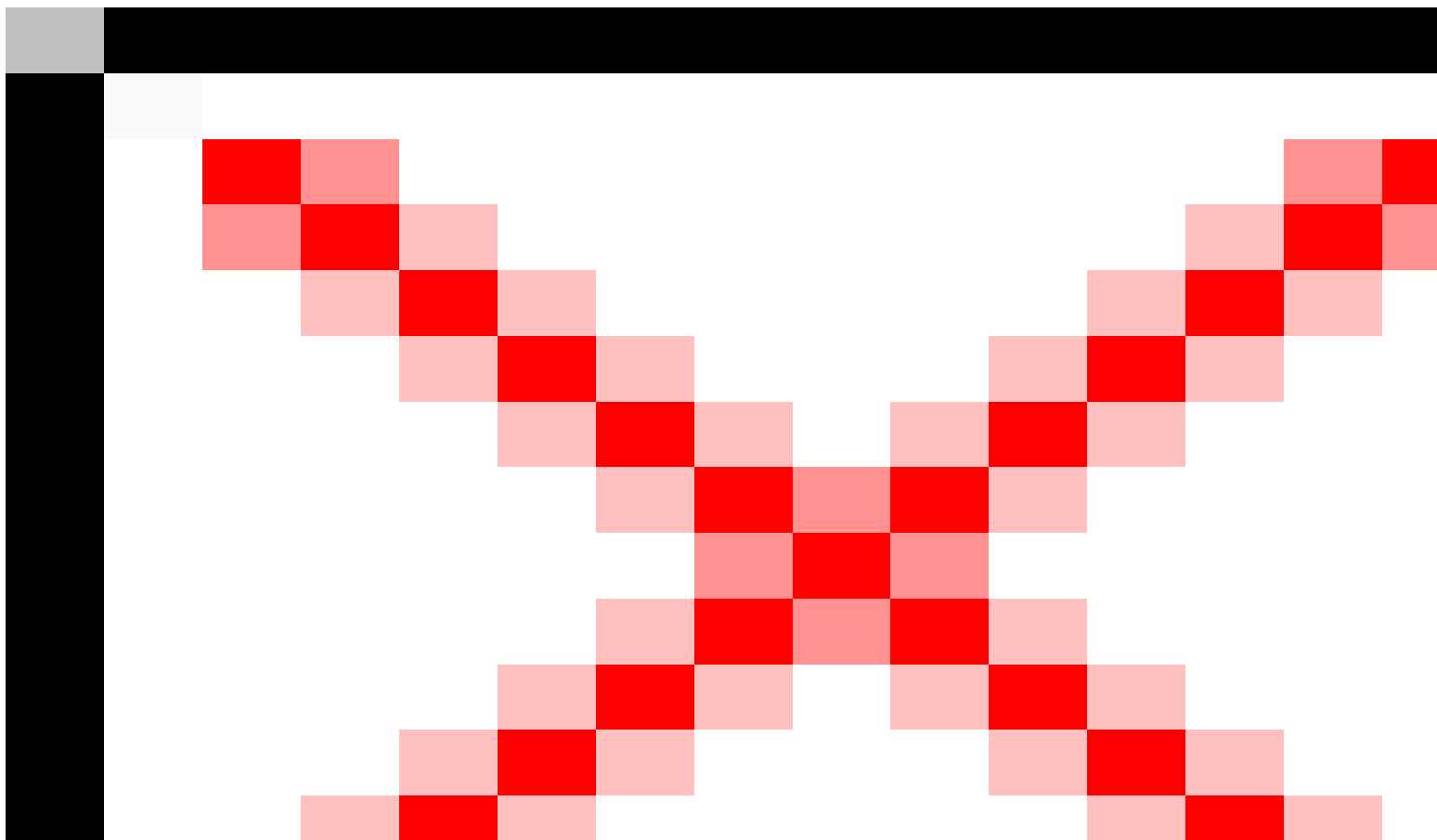
Ketua Peneliti, Prof Jamaluddin menyampaikan materi tentang pentingnya penerapan kebijakan *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)* pada perusahaan Kelapa Sawit yang berpengaruh pada pengembangan CPO yang dijadikan biodiesel. Ia menyoal perusahaan kelapa sawit di wilayah Kabupaten Aceh Utara diharapkan mampu menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat, terutama pada pengembangan CPO yang dapat dijadikan biodiesel serta meminimalisir efek negatif terhadap

“Untuk itu perusahaan tersebut dituntut untuk mendapatkan sertifikat ISPO. Namun dalam realitasnya untuk wilayah Aceh Utara dari 4 Perusahaan PKS hanya 1 yang sudah memiliki sertifikasi ISPO, sementara 3 lainnya belum dan masih dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tersebut.

Lanjutnya, sedangkan untuk Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit belum satupun memiliki sertifikat ISPO. Presiden RI Joko Widodo melalui Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit berkelanjutan Indonesia dan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Sawit berkelanjutan Indonesia, untuk mempercepat proses sertifikasi perusahaan Kelapa Sawit, terutama dalam menghasilkan CPO yang diolah menjadi biodiesel (B30).

“Kegiatan FGD ini diharapkan mendapatkan masukan dan penyempurnaan dalam penelitian sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik,” ungkap Prof Jamal.

Kegiatan tersebut diikuti oleh peserta dari unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara, perwakilan perusahaan Kelapa Sawit, masyarakat sipil, termasuk asosiasi perkebunan kelapa sawit, dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Setelah mendapatkan masukan dari peserta FGD.



Tanggal: 15 October 2022

Post by: [Tami](#)

Kategori: [News](#),

Tags: [Unimal](#), [Aceh](#), [Lhokseumawe](#), [Hukum Unimal](#),